

Proyek Transformasi Digital: Antara Pembangunan Masyarakat dan Praktik Aktivisme Digital di Indonesia

Novel Adryan Purnomo¹, Argyo Demartoto², Bayu Wicaksono³

¹Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, noveladryanpurnomo@mail.ugm.ac.id

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, argyodemartoto_fisip@staff.uns.ac.id

³Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, bayuwicaksono548191@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital berulang kali digaungkan oleh pemerintah sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mendukung kemajuan pembangunan masyarakat di Indonesia. Di lain sisi, transformasi digital bukan hanya berbicara tentang konektivitas dan transparansi namun isu-isu sosial politik yang lebih mendalam. Kondisi sosio kultural masyarakat yang erat dengan jaringan sosial membuat digitalisasi dan media sosial sebagai salah satu produknya terkesan relevan. Media sosial telah menjadi bagian dari habitus masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga dinamika politik pemerintahan. Selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga Mei 2026 telah terjadi beberapa aksi yang digerakkan oleh media sosial seperti Aksi Indonesia Gelap, Revolusi Rakyat Indonesia, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dan beberapa aksi lainnya. Berdasarkan realita tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara kritis pertentangan antara proyek besar transformasi digital di Indonesia dan realita praktis dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dianalisis dengan perspektif kritis masyarakat kontrol Deleuze. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital membuka implikasi yang lebih besar dari sekadar transparansi dan konektivitas. Pemerintah perlu membuka pula kesempatan bagi demokrasi yang turut bertransformasi menjadi digital activism. Kebijakan pembatasan penggunaan platform hingga sensor perlu dipastikan dapat menysar tujuan yang tepat alih-alih memundurkan praktik demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Transformasi Digital; Aktivisme Digital; Pembangunan Masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 telah mencanangkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut. Salah satu proyek yang menjadi prioritas nasional dan tercantum dalam beberapa target adalah percepatan transformasi digital. Proyek percepatan transformasi digital dijelaskan sebagai

salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan berskala nasional hingga daerah-daerah afirmasi. Hal ini merepresentasikan ambisi pemerintah untuk mengoptimalisasi adaptasi teknologi digital ke dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai strategi yang dijelaskan untuk mencapai percepatan transformasi digital diantaranya perluasan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) digital dan literasi digital serta pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok. Ketiga strategi tersebut ditekankan sebagai langkah utama untuk mencapai percepatan transformasi digital di seluruh daerah di Indonesia termasuk daerah-daerah afirmasi. Langkah ini merepresentasikan keseriusan pemerintah untuk melakukan perubahan, namun di sisi lain implikasi sosiologis yang lebih mendalam perlu dikaji ulang.

Rencana besar pemerintah yang tertuang dalam PSN merupakan ranah makro dalam praktik digitalisasi masyarakat di Indonesia. Ketika menelisik pada ranah mikro, alat digital yang paling dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari adalah media sosial. Digitalisasi merubah masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalam ranah sosial, masyarakat Indonesia memanfaatkan produk-produk digital seperti platform WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya sebagai sarana untuk mengakses informasi, berinteraksi dan mempromosikan budaya lokal (Pramanti dkk., 2019). Dalam konteks ekonomi, digitalisasi merubah pola konsumsi hingga transaksi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 melalui optimalisasi perdagangan elektronik (Futri dan Naruetharadhol, 2025). Beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi bagi usaha yang berkelanjutan (Kurniawati dkk., 2022). Dalam konteks politik pemerintahan, media sosial kini menggeser posisi televisi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (Kartikawangi 2020; Syafei dan Rahyadi 2025). Media sosial justru menjadi media yang lebih dipilih dibandingkan platform-platform aduan resmi yang dibuat oleh pemerintah (Novianti dkk., 2025). Namun, tantangan etis seperti keseimbangan antara etika digital dan kebebasan pengguna media sosial masih menjadi tantangan serius yang seringkali berimplikasi pada munculnya masalah-masalah yang lebih kompleks (Olivia dkk., 2025). Data-data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah terhabitasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, transformasi digital dapat menunjukkan implikasinya bagi peningkatan kapasitas SDM.

Peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu upaya mencapai percepatan transformasi digital realitanya masih perlu dikaji ulang dalam kerangka kritis. Meninjau 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, telah terjadi berbagai aksi yang digerakkan melalui media sosial. Berbagai aksi seperti Aksi Indonesia Gelap, Revolusi Rakyat Indonesia, Solidaritas Ojek Online, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dan beberapa aksi lainnya dimulai dari gerakan *slacktivism* di media sosial hingga beralih menjadi aktivisme. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial hari ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melainkan pula pemenuhan hak mereka atas tanggungjawab negara. Alih-alih menyadari sepenuhnya fenomena ini sebagai implikasi dari transformasi digital, negara cenderung mengarah kepada respon-respon pembatasan akses yang membahayakan demokrasi hingga tujuan transformasi digital itu sendiri. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara kritis

transformasi digital sebagai agenda besar negara dengan implikasi nyata pada praktik kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Langkah-langkah studi literatur ini meliputi pencarian artikel melalui kata kunci, pengumpulan dan identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian serta penyusunan ringkasan literatur (Cresswell, 2007). Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber sekunder berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional dan jurnal nasional bereputasi, prosiding, buku serta berbagai artikel yang relevan dengan tema penelitian yaitu aktivismedigital, aktivisme konvensional, kebijakan digital dan relasi sosial. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan perspektif kritis Deleuze tentang masyarakat kontrol. Hasil penelitian didiskusikan pada bagian analisis data dengan membaginya ke dalam 2 fokus utama yaitu media sosial dan habitus masyarakat Indonesia serta aktivisme digital: melampaui transparansi dan konektivitas.

3. ANALISIS DATA

3.1. Media Sosial dan Habitus Masyarakat Indonesia

Jika Bourdieu menggagas budaya manusia terhabituasi oleh struktur sosial, Massimo Airoldi menggunakan konsep *macchine habbitus* untuk menjelaskan bagaimana algoritma membentuk budaya manusia (Airoldi, 2022). Kesukaan manusia terhadap objek-objek di luar mereka termanifestasi di dalam konten-konten media sosial yang mereka gunakan. Algoritma menjadi bagian lain dari diri yang terus membersamai aktivitas manusia sehari-hari sampai mereka memahami seperti apa diri itu sendiri, apa kesukaannya, apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka alami dan hal-hal privat lainnya. Data yang didapatkan melalui rekaman aktivitas diri manusia kemudian disajikan dalam bentuk preferensi konten-konten yang nampak seperti sudah diramalkan. Manusia mengalami sensasi-sensasi dejavu ketika melakukan *scrolling* media sosial, seperti baru pernah memikirkan sesuatu tapi diwujudkan langsung pada konten-konten yang disajikan untuk mereka.

Ritus manusia ditentukan oleh algoritma yang diproduksi juga oleh kebiasaan personal mereka sendiri. Pada akhirnya mereka terus melakukan berbagai perilaku digital sehari-hari dalam alam bawah sadar. Bisa jadi keinginan mereka di masa depan adalah keinginan yang terjajah dan tidak benar-benar merdeka berdasarkan *will* mereka sendiri. Untuk memperdalam pembahasan, artikel ini turut menjabarkan perspektif Morozov (2013) dengan konsepnya *slactivism* atau aktivisme malas. Morozov menyoroti bagaimana media sosial dan aktivisme digital sesungguhnya bercampur dengan berbagai maksud dari para penggunanya. Meskipun diskursus di media sosial mungkin terasa cukup mencekam, namun realitanya tidak seluruh pengguna berniat sama untuk menyampaikan aspirasi. Tidak jarang ada beberapa bagian dari mereka yang sekadar menjadikannya sebuah euforia ditambah cara-caranya yang cukup mudah, sekadar mengunggah cerita di akun mereka.

Argumen kritis yang telah dibangun terkait realita manusia digital hari ini sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Dalam konteks Indonesia terdapat realitas sosial yang cukup unik yaitu narasi “*The Power of Netizen +62*” yang merepresentasikan kuatnya aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di ruang digital (Pradanna dan Irawan, 2024). Di sisi lain hal ini merepresentasikan potensi besar pada penggiringan opini publik berbasis digital bagi netizen Indonesia. Meskipun mampu menjadi potensi kekuatan dalam konteks positif namun dalam perspektif kritis realitas ini juga mampu mengarah pada kekuatan dalam konteks negatif. *Power of Netizen +62* mengolah aktivisme melalui data-data yang bersumber dari media sosial yang berpotensi mengandung *hoax* berdasarkan aspek keviralan (Jalli, 2025). Dalam kondisi inilah kemudian cara pandang lain terhadap praktik demokrasi perlu digunakan.

Lebih dalam, penelitian ini mengambil beberapa aksi yang digerakkan oleh media sosial diantaranya Aksi Indonesia Gelap, Revolusi Rakyat Indonesia, Solidaritas Ojek Online, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Meskipun realitanya demonstrasi besar terjadi di berbagai wilayah Indonesia, namun suasana yang ditampilkan di dalam konten-konten media sosial nampak lebih mencekam. Alih-alih membaca fenomena ini secara positivistik, artikel ini berupaya untuk mengkritisi realita yang terjadi di dalam praktik aktivisme digital tersebut. Dalam perspektif kritis, aktivisme digital sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dimaknai semata-mata sebagai dukungan bagi praktik demokrasi. Sebelum media sosial hadir, aktivisme konvensional yang melibatkan relasi sosial mendalam antara masing-masing aktivis telah terlebih dahulu hidup (Kopacheva, 2021; Parma, 2022). Ruang-ruang konvensional (*offline*) membentuk interaksi mereka secara fisik serta melibatkan pula ikatan-ikatan emosional dan solidaritas yang nyata. Aspirasi yang mereka sampaikan benar-benar mewakili maksud yang sama kepada pihak-pihak yang dituntut. Sedangkan di era digital, media sosial kemudian turut memfasilitasi bentuk-bentuk aktivisme masyarakat sebagai warga negara (Meier, 2025). Diskursus dan aktivisme di ruang digital nampak bersuara keras namun realitanya diwarnai dengan ketidakmampuan untuk memastikan apakah suara mereka benar-benar sama. Atau justru mayoritas dari mereka adalah pelaku *slactivism* yang justru membuat aktivisme digital bersifat rapuh (Morozov, 2013).

3.2. Aktivisme Digital: Melampaui Transparansi dan Konektivitas

Transformasi digital tidak lagi dapat dimaknai secara teknokratis sebagai sebuah PSN yang positivistik. Fokus pandangan terhadap transformasi digital tidak hanya membahas tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya menuju masyarakat 5.0 (Anggono dkk., 2025; Masduki dan Wendratama, 2025). Pandangan tentang proyek tersebut sudah seharusnya turut meninjau sisi lain dari meningkatnya kapabilitas digital masyarakat yaitu praktik demokrasi yang turut bertransformasi menjadi bentuk-bentuk digital. Berbagai aksi yang berintegrasi dengan eksistensi teknologi digital sudah seharusnya disadari sebagai implikasi baik bagi demokrasi yang transformative, diikuti dengan kesadaran tentang fenomena *slactivism* bagi sisi masyarakat. Namun realitanya pemerintah nampaknya menunjukkan bahwa kondisi-kondisi semacam ini justru bertentangan dengan ambisi besar pada proyek transformasi digital.

Bersamaan dengan transformasi digital, masyarakat Indonesia bergerak semakin berkembang dan memiliki kapabilitas literasi digital yang membaik. Hal ini diikuti pula dengan praktik-praktik kewargaan konvensional yang turut bertransformasi dari aktivisme menjadi digital activism. Pada titik ini, suara-suara masyarakat termarjinal yang sebelumnya terbatas oleh jarak dan waktu mulai lebih banyak muncul dan berintegrasi dengan perangkat digital, sinyal dan diskursus media sosial. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat lebih sering merasakan permasalahan kewargaan terus menerus hadir di setiap harinya. Diskursus media sosial setiap harinya diisi dengan aspirasi, kritik hingga seruan gerakan massa baik digital maupun konvensional yang menyebabkan masyarakat memiliki gambaran menakutkan tentang pemerintah.

Di sisi lain, respon yang ditunjukkan oleh pemerintah nampaknya juga perlu dikritisi. Upaya-upaya penangkapan aktivis dan berbagai upaya perlawanan melalui discourse merepresentasikan ketidaksiapan pemerintah menghadapi implikasi dari demokrasi digital saat ini. Lebih jauh lagi, pemerintah saat ini justru melakukan langkah-langkah represif terhadap aktivisme digital. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seperti pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun dan registrasi kartu sim wajib biometrik wajah per 1 Juli 2026. Kebijakan-kebijakan tersebut di satu sisi menunjukkan bahwa Komdigi mulai menunjukkan keseriusannya mengawal isu digitalisasi sebagai Kementerian baru di pemerintahan. Produksi kebijakan merepresentasikan proses menuju titik terang pada praktik digitalisasi di Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki arah. Dari penggunaan media sosial yang dirayakan sebagai sebuah kebaruan untuk berjejaring, menuju budaya digital yang bertanggung jawab. Namun, dalam perspektif kritis fenomena ini perlu dibaca sebagai langkah-langkah yang patut diwaspadai. Kebijakan-kebijakan tersebut diambil pasca aktivisme digital masyarakat sipil mulai menjadi diskursus besar bahkan bisa dikatakan mengancam stabilitas jalannya pemerintahan. Hal-hal semacam inilah yang perlu diwaspadai sebagai bagian dari proyeksi ancaman praktik demokrasi di masa depan.

Proyeksi ini didasarkan pada beberapa studi kasus terkait dinamika politik negara-negara di dunia menghadapi digitalisasi. Beberapa negara yang tergabung di dalam aliansi ekonomi dan geopolitik BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina (Tiongkok), dan Afrika Selatan menerapkan kebijakan digital yang cenderung mengarah pada sensor, lokalisasi data dan penargetan konten politik. Rusia mengambil kebijakan yang mewajibkan para penyedia layanan internet untuk menyimpan riwayat komunikasi pengguna hingga 3 tahun dan memberikan kunci dekripsi pesan kepada Dinas Keamanan Federal. Selain itu, Rusia membangun sisten *Domain Name System* (DNS) alternatif sehingga internet beroperasi secara tertutup dari jaringan global. Tiongkok menerapkan sistem manajemen konten (*Great Firewall*), mewajibkan registrasi nama asli, mengkriminalisasi penyebaran rumor *online* dan sistem pengawasan pengenalan wajah massal untuk menjaga stabilitas rezim dan keamanan nasional. India menerapkan Undang-Undang Teknologi Informasi (IT Act) yang membuat pemerintah bisa melakukan blokir informasi warga melalui perangkat komputer mana pun. Afrika Selatan melarang aktivasi kartu SIM jika penyedia layanan belum menyimpan identitas pengguna sehingga seluruh data pengguna dapat dimanfaatkan untuk jaminan keamanan. Brazil memasang kamera pengawasan publik dengan teknologi pengenalan wajah dan secara historis muncul dari

tujuan menekan oposisi politik. Secara umum, kebijakan negara-negara tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan iklim politik masing-masing negara (Belli, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sentimen yang dihasilkan di dalam diskursus ruang digital di satu sisi dapat dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi, praktik bernegara dan lebih jauh pada kekuasaan pemerintah atas warganya. Praktik digital memang memerlukan regulasi yang jelas untuk menghadapi ancaman dan membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, definisi ancaman ini perlu dipertegas dengan kritis. Alih-alih melindungi praktik digital warganya, pemerintah sebagai penguasa berpotensi untuk menerapkan kebijakan yang melindungi kepentingan dan kekuasaan mereka. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bagaimana transformasi digital turut merubah masyarakat dari masyarakat disiplin menuju masyarakat kontrol. Dalam Deleuze (1995), masyarakat dikatakan tidak lagi terkungkung dalam penjara-penjara fisik seperti halnya pra Perang Dunia II. Penjara fisik di era digital bertransformasi menjadi perangkat-perangkat teknologi informasi yang memenjarakan mereka melintas batas dan waktu. Lebih jauh lagi Deleuze menyoroti peralihan besar pada bekerjanya sistem-sistem pendisiplinan dari penguasa terhadap pihak-pihak yang dikuasai. Mereka yang dikuasai tidak lagi dapat dipetakan dan seringkali ditemukan tanda-tandanya secara jelas. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan individu (yang terbagi) menjadi entitas dividu di mana masing-masing dari mereka dirubah menjadi entitas yang dapat dipecah-pecah menjadi angka dan data. Pengawasan dilakukan oleh penguasa secara terus menerus melalui mekanisme yang bekerja di ruang terbuka alih-alih penjara-penjara fisik yang nampak. Melalui perspektif ini, transformasi digital di Indonesia perlu terus dikawal dengan tidak sekadar mempertimbangkan aspek-aspek teknokratis melainkan pula peningkatan kehidupan masyarakatnya.

4. KESIMPULAN

Transformasi digital perlu dipahami tidak sekadar sebagai sebuah proyek strategis yang teknokratis melainkan pula sebuah misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Segala bentuk kebijakan perlu mempertimbangkan pula kapabilitas masyarakat dalam praktik demokrasi yang menjadi implikasi dari proyek tersebut. Aktivisme digital dan bentuk-bentuk praktik penyampaian aspirasi di media sosial seharusnya bukan lagi menjadi ancaman bagi negara seperti yang disebut Deleuze sebagai pembentukan masyarakat kontrol. Media justru perlu dianggap sebagai infrastruktur yang membantu penyelenggaraan pemerintahan menuju arah yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat perlu menyadari bahwa media sosial dan dinamika politiknya memang cukup sulit untuk dipisahkan. Akibatnya seringkali sebuah permasalahan menjadi lebih terdramatisasi sehingga dirasakan lebih parah dari yang sebenarnya terjadi. Alih-alih tujuan penyampaian aspirasi tercapai, kondisi ini justru menyebabkan *chaos* di ruang digital dan menyerang ketenteraman hidup masyarakat serta praktik bernegara dalam arti yang luas. Penelitian ini menawarkan sebuah paradigma tentang kesadaran kultur dan konsistensi pemerintah sebagai implikasi dari dibawahnya digital sebagai sebuah proyek strategis negara yang menyeimbangkan pembangunan masyarakat dan aktivisme digital.

REFERENSI

- Airoidi, Massimo. 2022. *Machine Habitus: Toward a Sociology of Algorithms*. Cambridge: Polity Press.
- Anggono, Bayu Dwi, Aulia Oktarizka Vivi, Septhian Eka, Negeri Semarang, dan Rofi Wahanisa. 2025. "Interrogating the Legal Foundations of Digital Transformation : Balancing Economic Growth and Social Welfare in the Era of Disruption." *VIII(40):191–211*. doi:10.24090/volksgeist.v8i1.12211.
- Belli, Luca. 2021. *CyberBRICS : Cybersecurity Regulations in the BRICS Countries*. Cham: Springer International Publishing.
- Cresswell, J. W. 2007. "Five Qualitative Approaches to Inquiry." Pp. 53–84 in *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five Approaches*. Thousands Oaks: Sage Publications.
- Deleuze, Gilles. 1995. *Negotiations*. edited by M. Joughin. New York: Columbia University Press.
- Futri, Irianna, dan Phaninee Naruetharadhol. 2025. "Open Innovation ' s Effects on Indonesia ' s Digital Health Market and Related Societal Issues." *Cogent Arts & Humanities* 12(1). doi:10.1080/23311983.2025.2457819.
- Jalli, Nuurrianti. 2025. "Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia." *Social Media and Society* 11(1). doi:10.1177/20563051251318122.
- Kartikawangi, Dorien. 2020. "Focus Group Based Evaluation of Social Media Usage in Indonesia ' s." 8(1):41–58.
- Kopacheva, Elizaveta. 2021. "How the Internet Has Changed Participation : Exploring Distinctive Preconditions of Online Activism." 34(2):67–85. doi:10.15581/003.34.2.67-85.
- Kurniawati, E., U. H. A. Kohar, dan K. Pirzada. 2022. "Change or Destroy: The Digital Transformation of Indonesian MSME's to Achieve Sustainable Economy." 26(2):0–3. doi:10.17512/pjms.2022.26.2.15.
- Masduki, Masduki, dan Engelbertus Wendratama. 2025. "Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia." *Journalism and Media* 6(3):1–15. doi:https://doi.org/10.3390/journalmedia6030101.
- Meier, Charlotte. 2025. "Digital Activism." *Elgar Encyclopedia of Political Communication* 412–415. doi:https://doi.org/10.4337/9781035301447.vol1.00104.
- Morozov, Evgeny. 2013. *To Save Everything Click Here*. PublicAffairs.
- Novianti, Evi, Hernadi Affandi, and Eman Suparman. 2025. "Public Participation in Lawmaking in the Digital Age: Insights from Indonesia." *Journal of Legislative Studies*.
- Olivia, Tania, Erwin Halim, dan Lea Sulaiman Saputra. 2025. "Digital Ethics and the Overrated Phenomenon: Balancing Freedom and Responsibility in Social Media." in *13th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*. Tangerang Selatan: IEEE.
- Parma, Roman. 2022. "Civic Activism of Generations in Modern Russian Society." *Social Sciences* 53(3):4–16.
- Pradanna, Satrio Alpen, dan Hendri Irawan. 2024. "The Power Netizen +62 in Influence Public Opinion: Analysis of Online Debates on Social Issues." *Science and Education* 3:367–76.
- Pramanti, Adilita, Paisal Halim, and Angga Sulaiman. 2019. "The Risk of Commercialization Local Culture and Digital Community Growth of Rural Environment." in *1st GCC International*

Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Riyadh: The IEOM Society International.

Syafei, Ubait Alfin Nurzavito Mario, dan Irmawan Rahyadi. 2025. "Switching the TV, Switching Perspectives: Social Media Insights on Indonesia's Analog Switch Off Journey." in *19th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM)*. Bangkok: IEEE.